

**FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(studi kasus di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Oleh:

HANNA FEBRI ARIESKA



JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

ABSTRACT

SUPPORTING FACTORS AND OBSTACLES IN THE IMPLEMENTATION COMMUNITY EMPOWERMENT IN LAW NO. 6 OF 2014 ON VILLAGE

By

Hanna Febri Arieska

This study aims to identify and explain the supporting factors and obstacles in the implementation of community empowerment Law no. 6 of 2014 on village. This research using qualitative methods. Technique of determining the informant so in this study are 5 people at village official; such as village head, village secretary, village treasurer, chairman of community development organization and the chairman of the body parley village. Based on research conducted the obtained result that village has implemented hajimena village law no.6 of 2014 on village as they are directed. In the legislation there is the village fund, which fell by 300 million, however the fund doesn't only consist of the allocation of fund as the village but consist of budget revenue and expenditure, state budget as well as income of the village owned enterprise. Implementation of existing community empowerment in village hajimena poured of realized in the construction of such paving block, road cast rebates, talut retaining soil, drainage, concrete slab and sabes. While the constraint factor is the condition of the population its lack of community participation and dependence on government programs such as PNPM.

Keyword : Community Empowerment, Law no.6 of 2014 on Village

ABSTRAK

FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi kasus di desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

Hanna Febri Arieska

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan factor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga informan didalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Daban Permusyawarahan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa di desa Hajimena telah melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desasesuai dengan yang diperintahkan. Dalam undang-undang tersebut ada dana desa yang turun sebesar 300 juta rupiah, namun dana desa tidak hanya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) saja, namun namun terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di desa Hajimena juga ada pemberdayaan masyarakat seperti yang diterangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, namun pemberdayaan masyarakat yang ada tidak aktif. Implementasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Hajimena dituangkan atau direalisasikan dalam pembangunan berbentuk seperti hotmik, paving blok, jalan cor rabat, talut penahan tanah, drainase, plat beton, dan sabes. Adapun factor pendukung pemberdayaan masyarakat seperti fasilitas yang memadai dan pendanaan untuk program atau kegiatan. Sedangkan factor kendalanya adalah kondisi penduduk, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketergantungan terhadap program pemerintah seperti PNPM.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

**FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA IMPLEMENTASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(studi kasus di Desa Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan)**

Oleh

HANNA FEBRI ARIESKA

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Sosiologi
Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Juduk Skripsi

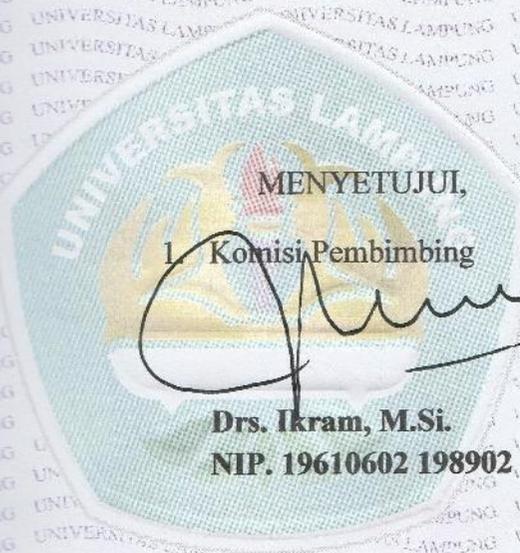
**FAKTOR PENDUKUNG DAN
KENDALA IMPLEMENTASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (studi
kasus di Desa Hajimena Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Hanna Febri Arieska**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1216011042**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Ikram, M.Si.

NIP. 19610602 198902 1 001

2. **Ketua Program Studi**

Drs. Susetyo, M.Si.

NIP. 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ikram, M.Si.

Penguji Utama : Drs. Susetyo, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP. 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Akhir : 16 Mei 2016



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanna Febri Arieska
NPM : 1216011042
Jurusan : Sosiologi
Alamat Rumah : Jalan Dewi Sartika, RT. 016 / RW. 004
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota
Metro.
No. HP / Telp.Rumah : 081272223092

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian Skripsi saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 25 Mei 2016

Saya yang menyatakan



Hanna Febri Arieska

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, Lampung pada tanggal 04 Februari 1994, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sapon dan Ibu Warsilawati.

Jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis:

Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak(TK) PKK 1 Banjarsari pada tahun 1998 dan diselesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Metro Utara pada tahun 2000 dan diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan di Sekolah Penengah Pertama (SMP) Negeri 6 Metro pada tahun 2006 sampai 2009, penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Trimurjo pada tahun 2009 sampai 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan SOSIOLOGI.

MOTO

“GENIUS IS 1% INSPIRATION AND 99% HARD WORK”

(HANNA FEBRI ARIESKA)

**Sesungguhnya kegagalan itu bukan berarti kehancuran, akan
tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai cermin kehidupan
dimasa depan.**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada hambanya, serta selalu memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga sampai saat ini.
2. Ayah Sapon yang telah mendoakan ku serta menantikan keberhasilanku untuk mencapai gelar Sarjana.
3. Ibunda Warsilawati yang telah mendoakan ku, yang selalu mendukungku untuk tetap semangat menjalani kuliah dan rela berkorban demi menantikan keberhasilanku untuk mencapai gelar Sarjana.
4. Adikku Irvan Sanjaya, terimakasih untuk perang-perangannya selama ini, perang yang sering kita lakukan adalah motivasi dan semangat ku untuk mencapai gelar Sarjana, dan semoga nanti kamu bisa kuliah lebih tinggi dari aku.(amin)
5. Semua keluarga besar yang telah mendukungku untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga mencapai gelar Sarjana.
6. Seseorang yang telah memberikan semangat berjuang yang lebih buat saya, sebut saja nama nya "Ahmad Pebri". Buat dang Peb terimakasih banyak karena sudah menemani saya selama setahun lebih, terimakasih atas kasih sayang dan perhatian yang udah dang kasih ke aku, terimakasih sudah mau direpotin untuk pergi kesana dan kesini, semuanya yang dang lakuin gak sia-sia kok 😊

7. Buat teman seperjuanganku selama kuliah Pitut (puspitasari), intan, novi, okta, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik buatku, terimakasih atas motivasi dan pendapatnya selama ini maaf kalau hanna banyak salah, semoga kalian cepat wisuda juga yaa dan kita sukses bareng-bareng ☺
8. Buat teman-teman yang lain : Suci, sinta, siska, menk, mega, Suhendra (pembahas semprop), imam gunawan, devi, dan untuk semua anak-anak jurusan Sosiologi angkatan 2012, maaf yaa kalau hanna banyak salah semoga kita bisa bertemu lagi di kehidupan yang sebenarnya(dunia nyata).
9. Buat teman-teman KKN sekelompok ku Mbak Desi, Indah, kak agus, Arif, Silvester, dan pak akbar terimakasih atas kerjasamanya dan keseruannya selama KKN di Tubaba desa Sumber Jaya. Buat teman-teman KKN kelompok lain Ucup, Andre, korcam (arifin), om Dian, Eldinery, Ratna Kedokteran, Ratna Hukum, dll terimakasih atas kerjasamanya dan maaf kalau aku udah lama gak ada kabar.
10. Buat teman-teman kosan Astri 21 (kosan lama) Rika, Ambar, Yona, Mbak Ning, mbak Desi, Mbak nani, dll serta teman-teman kosan wisma ananda (kosan sekarang) Putri, Junarli, Dian, Anggun, Palupi, dll terimakasih karena kita saling memotivasi satu sama lain, semoga cepat wisuda.
11. Dan untuk Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Penulis menghaturkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, pemilik segala keagungan. Dengan ridho dan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”**, Penulis sadar dan merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”, hal ini dikarenakan masih banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dari awal hingga akhir penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Susetyo M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas.
3. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku Pembimbing Utama yang selalu mendukung, membantu, dan sabar memberi masukan selama proses bimbingan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih untuk semua ilmu yang bapak berikan.

4. Bapak Drs. Payrulsyah, M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unila yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis serta staf akademik dan karyawan FISIP Unila atas segala kemudahan dan bantuannya.
6. Bapak dan Ibuku tersayang, terima kasih untuk kasih sayang, kesabaran, doa pengorbanan dan didikan selama ini yang bapak dan ibu berikan. Maaf baru ini yang dapat aku persembahkan untuk kalian. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini menjadi awal kesuksesanku sehingga bapak dan ibu bangga mempunyai anak sepertiku.
7. Kepala Desa Hajimena beserta aparat desa lainnya, terima kasih atas kemudahan yang diberikan ketika saya melakukan penelitian.
8. Untuk Ahmad Pebri, terimakasih untuk semua waktunya, terimakasih untuk kasih sayang dan perhatiannya, terimakasih untuk susah maupun senang, semoga kita akan tetap bersama meskipun kita harus jauh.
9. Untuk sahabat teristimewaku, Puspitasari, Novita Saktia Lestari, Oktavia Sanjaya, Intan Fakhrina, Suci Tri Kumalasari, Sinta Lestari, Renda Pitriyani, Siska Desi, Terimakasih atas dukungan, doa, bantuan dan kebersamaanya selama ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga meski jarak dan waktu memisahkan.
10. Buat teman-teman seperjuangan yang lain : Menk, Mega, Suhendra (pembahas semprop), Imam Gunawan, Devi Retno Wati, dan untuk semua anak-anak jurusan Sosiologi angkatan 2012, maaf yaa kalau hanna banyak

salah semoga kita bisa bertemu lagi di kehidupan yang sebenarnya (dunia nyata).

11. Buat teman-teman KKN sekelompok ku Mbak Desi, Indah, kak agus, Arif, Silvester, dan pak akbar terimakasih atas kerjasamanya dan keseruannya selama KKN di Tubaba desa Sumber Jaya. Buat teman-teman KKN kelompok lain Ucup, Andre, korcam (arifin), om Dian, Eldinery, Ratna Kedokteran, Ratna Hukum, dll terimakasih atas kerjasamanya dan maaf kalau aku udah lama gak ada kabar.
12. Buat teman-teman kosan Astri 21 (kosan lama) Rika, Ambar, Yona, Mbak Ning, mbak Desi, Mbak nani, dll serta teman-teman kosan wisma ananda (kosan sekarang) Putri, Junarli, Dian, Anggun, Palupi, dll terimakasih karena kita saling memotivasi satu sama lain, semoga cepat wisuda.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat.

Bandar Lampung, Mei 2016
Penulis

Hanna Febri Arieska

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis	11
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	11
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	18
4. Pengertian Implementasi Masyarakat	21
B. Kerangka Pemikiran	22
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	24

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	25
B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Penentuan Informan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Asal-Usul Desa Hajimena	35
B. Keterangan Demografi Desa Hajimena	37
1. Letak Geografi	37
2. Bidang Pendidikan	38
3. Bidang Hukum	39
4. Keamanan	40
C. Komposisi Penduduk Desa Hajimena	40
D. Penggunaan dan Penguasaan Lahan Desa Hajimena	45
E. Sarana Transportasi Desa Hajimena	46
F. Visi Desa Hajimena	46
G. Misi Desa Hajimena	47
H. Struktur Organisasi Desa Hajimena	47

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	49
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	50
C. Sumber Dana dan Penggunaan Dana Desa	51
D. Pemberdayaan Masyarakat	59
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	61
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	62
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	63
E. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	64
1. Kesiapan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat	67
a. Kepala Desa	67
b. Masyarakat Desa Hajimena	68
2. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat	69
3. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat	71
a. Fasilitas	71
b. Pendanaan	72
4. Faktor Kendala/Penghambat Pemberdayaan Masyarakat	73
a. Kondisi Penduduk	73

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat	73
c. Ketergantungan (Depedence)	74
F. Pembangunan Desa	75
1. Pembangunan Desa yang sudah Terealisasi di Tahun 2015	75
2. Dampak Positif Pembangunan Yang sudah Terealisasikan	75

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Pejabat Kepala Desa Hajimena.....	36
Tabel 2. Jumlah Sekolah yang ada di Desa Hajimena	38
Tabel 3. Sarana Keamanan Lingkungan	40
Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	41
Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Suku / Ras	42
Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Agama	43
Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	43
Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	44
Tabel 9. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaannya	45
Tabel 10. Penggunaan ADD Tahun 2015 untuk Fisik	55
Tabel 11. Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk Fisik	56

I.PENDULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh masyarakat desa tak terkecuali para perangkat desanya. Pada Rabu 18 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Kemudian pada 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani guna mengesahkan Undang-Undang tersebut.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang tinggal disuatu daerah yang sama, yang bersatu dan bersama-sama, memiliki ikatan yang kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan pada masyarakat desa tradisi itu masih sangat kuat dan kental. Bahkan terkadang tradisi ini juga sangat mempengaruhi perkembangan desa, karena terlalu tinggi menjunjung kepercayaan nenek moyang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pembaharuan desa.

Disisi lain banyak hal yang mengakibatkan sebuah desa sulit untuk mengalami pembaharuan, antara lain isolasi wilayah, yaitu desa yang wilayahnya berada jauh dari pusat ekonomi daerah, desa yang mengalami ketertinggalan di bidang pembangunan jalan dan sarana-sarana lainnya, sulitnya akses dari luar, bahkan desa yang mengalami kemiskinan dan keminiman tingkat pendidikan. Tidak hanya sulit dalam pembaharuan desa tetapi juga sulit untuk mengembangkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk itu maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat di setiap desa agar desa tersebut dapat mengalami perubahan.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif.

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan / kekuatan yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu untuk menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

“Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat substansial adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi pada penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan

masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan berbagai aspek. Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari lingkup dan objek pemberdayaan yang mencakup berbagai aspek, seperti : *pertama*, Peningkatan kepemilikan aset (sumber daya fisik dan finansial) serta kemampuan (secara individual dan kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka; *kedua*, Hubungan antar individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemilikan aset dan kemampuan memanfaatkannya; *ketiga*, Pemberdayaan

dan reformasi kelembagaan; *keempat*, Pengembangan jejaring dan kemitraan kerja, baik ditingkat lokal, regional, maupun global.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan model pemberdayaan masyarakat dahulu agar pemberdayaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Dulu pemberdayaan masyarakat lebih menggunakan model *Top-down*. Dalam model *Top-down* pemerintah memegang peranan penting dalam hal pendanaan untuk semua aspek yang ada. Pemerintah member dana atau umbangih yang besar lalu menyuruh masyarakat untuk mengelolanya, jika pendanaan itu habis dan tidak ada lagi maka berhenti juga semua aktifitas masyarakat yang beraal dari pemerintah itu, karena masyarakat tidak merasa memiliki apa yang sudah mereka kerjakan.

Namun sekarang pemberdayaan masyarakat lebih menggunakan model *Bottom-up*. Kenapa lebih menggunakan model *bottom-up*? Karena model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumukan bersama, sejumlah nilai dan item dipahami bersama. Model *bottom* memulai dengan ituai dan kondii serta potensi lokal. Dengan kata lain model ini menempatkan manusia sebagai subjek. Pendekatan *bottom-up* lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene nya memang untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun pendekatan *bottom-up* memberikan kesan lebih manusiawi dan

memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ;

“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat

dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Tidak hanya aspek dan tujuan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi implementasi pemberdayaan masyarakat lah yang penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat disuatu desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan oleh perangkat desa. Namun dalam melaksanakan implementasi pemberdayaan masyarakat di butuhkan beberapa kerjasama dan partisipasi antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri. Dalam melaksanakan implementasi pemberdayaan masyarakat pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat, seperti : kuatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, adanya rasa ingin merubah keadaan agar lebih baik, adanya sumber alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan untuk kemungkinan faktor kendalanya, seperti : sikap masyarakat yang masih tradisional sehingga sulit untuk menerima kebudayaan luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat, adanya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, adanya rasa tidak percaya diri

yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak leluasa untuk bergaul dengan masyarakat luar.

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat sehingga peneliti memberi judul **“FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UU No.6 TAHUN 2014 ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perubahan model Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 mampu menjadikan Desa Hajimena lebih mandiri?
2. Bagaimana kesiapan pelaku Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hajimena?
3. Apa saja faktor pendukung dan kendala implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hajimena?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perubahan model Pemberdayaan Masyarakat dapat menjadikan Desa Hajimena lebih mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaku Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hajimena.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala implementasi Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Hajimena.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada desa Sukaraja dalam mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansi merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnyafungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru). Sehingga realisasi social yang nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antarsubyek dengan subyek yang lain (vidhyandika 1996). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan.

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan.

Hal itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 Oktober sampai Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung-tombak dari Strategi Trisula (three-pronged strategy) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari: penggalakan peluang (promoting opportunity) fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment) dan peningkatan keamanan (enhancing security).

Menurut Parson (dalam Anwas, 2014), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. menurut Ife (dalam Anwas, 2014), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Secara lebih rinci Slamet (2003) menjelaskan masyarakat yang budaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan bertindak sesuai dengan situasi.

Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996), pemberdayaan adalah suatu upaca untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, Negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil

dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, sosial.

Menurut Sulistiyani (2004) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Aziz, dkk (2005) :

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007)

yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Adimihardja (1999) adalah tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam

pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi nilai tambah sosial budaya.

Dari konstruksi pemikiran yang dikemukakan itu menunjukkan bahwa makna pemberdayaan di era reformasi dan situasi krisis ekonomi pada saat ini lebih kuat diwarnai perspektif politik dan ekonomi dari pada perpektif sosial dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber yang datang dari atas untuk kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, dengan kurang memberikan peluang agar inisiatif tumbuh dari masyarakat atau menumbuh kembangkan perilaku sosial masyarakat untuk di dukung melalui pengayaan orientasi, motivasi, pengambilan keputusan sendiri oleh masyarakat, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996).

Menurut Sumodiningrat (1997), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah usaha mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (UU No.6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 14).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan – kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab Negara. *Kedua*, memberikan layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) Negara.. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Eko, 2002).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat menurut Tjokrowinoto dan Pranarka (1996) bahwa :

“harus ditempatkan tidak hanya secara individual akan tetapi secara kolektif, dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktur dan substansial. Hal ini menempatkan konsep Pemberdayaan sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di

berbagai kehidupan : politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya”.

Dari konsepsi tersebut menunjukkan bahwa dalam membangun masyarakat ke depan, maka diperlukan suatu keseimbangan (keadilan) yang manusiawi antara kehidupan politik, ekonomi, hukum dan kehidupan sosial budaya bagi setiap manusia atau masyarakat. Keharusan ini menjadi sangat penting oleh karena persoalan-persoalan sosial budaya, ekonomi dan politik termasuk persoalan hukum akan menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat sebagai akibat dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbendung.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Usman (2003) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan

bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Korten dalam Sumaryadi (2005) mengemukakan bahwa strategi program pengembangan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang tercermin dalam empat generasi, yaitu:

- a. Generasi pertama mengutamakan relief and welfare yaitu dengan berusaha segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Generasi kedua memusatkan kegiatannya pada small-scale reliant local development atau disebut dengan community development, yang meliputi

pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, penyelesaian persoalan masyarakat bawah (grassroot) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan atas bawah (top-down approach), melainkan membutuhkan pendekatan bawah atas (bottom-up approach).

- c. Generasi ketiga adalah mereka yang terlibat dalam sustainable system development, mulai mempermasalahkan dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh keluar daerahnya, ketingkat regional, nasional, dan internasional. Strategi ini mengharapkn perubahan pada tingkat regionl dan nasional.
- d. Generasi keempat merupakan fasilitator gerakan masyarakat (people movement). Hal ini dilakukan dengan membantu rakyat mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan local dan memobilisasi sumber daya yang ada. Generasi ini juga mengharapkan adanya perubahan dalam pelaksanaannya.

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a. *The walfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.

- b. *The development approach*, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat.
- c. *The empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaannya.

Ismawan dan Priyono (dalam Sumaryadi 2005), mengemukakan lima strategi pengembangan dalam rangka pemberdayaan rakyat sebagai berikut :

- a. Program pengembangan sumber daya manusia
- b. Program pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Program pemupukan program swasta
- d. Program pengembangan usaha produktif
- e. Program penyediaan informasi tepat guna

4. Pengertian Implementasi Masyarakat

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Usman (2002) dalam bukunya yang berjudul *konteks implementasi berbasis kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Usman, 2002) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Usman, 2002) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa.

Implementasi pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya holistik yang menyangkut semua aspek kehidupan yang ada dan terjadi dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial dan cenderung sulit dipisah-pisahkan. Namun untuk memudahkan dalam pemahaman dan implementasinya, pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan focus kegiatan / aktivitas atau potensi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Berdasarkan focus ini, maka pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan dengan focus pada beberapa sector, misalnya : sector pendidikan, sector kesehatan, sector usaha kecil, sector pertanian, pemberdayaan potensi wilayah, pemberdayaan didaerah bencana, pemberdayaan kaum disabilitas, pemberdayaan model *corporate social responsibility* (SCR), pemberdayaan perempuan, dan lain-lain.

B. Kerangka Pemikiran

Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat, merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pemba-ngunan, yaitu untuk

mengembangkan sasaran menjadi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas hidup-nya secara mandiri, tidak tergantung pada “belas kasih” pihak lain. Secara lebih rinci Slamet (2003) menjelaskan masyarakat yang budaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan bertindak sesuai dengan situasi.

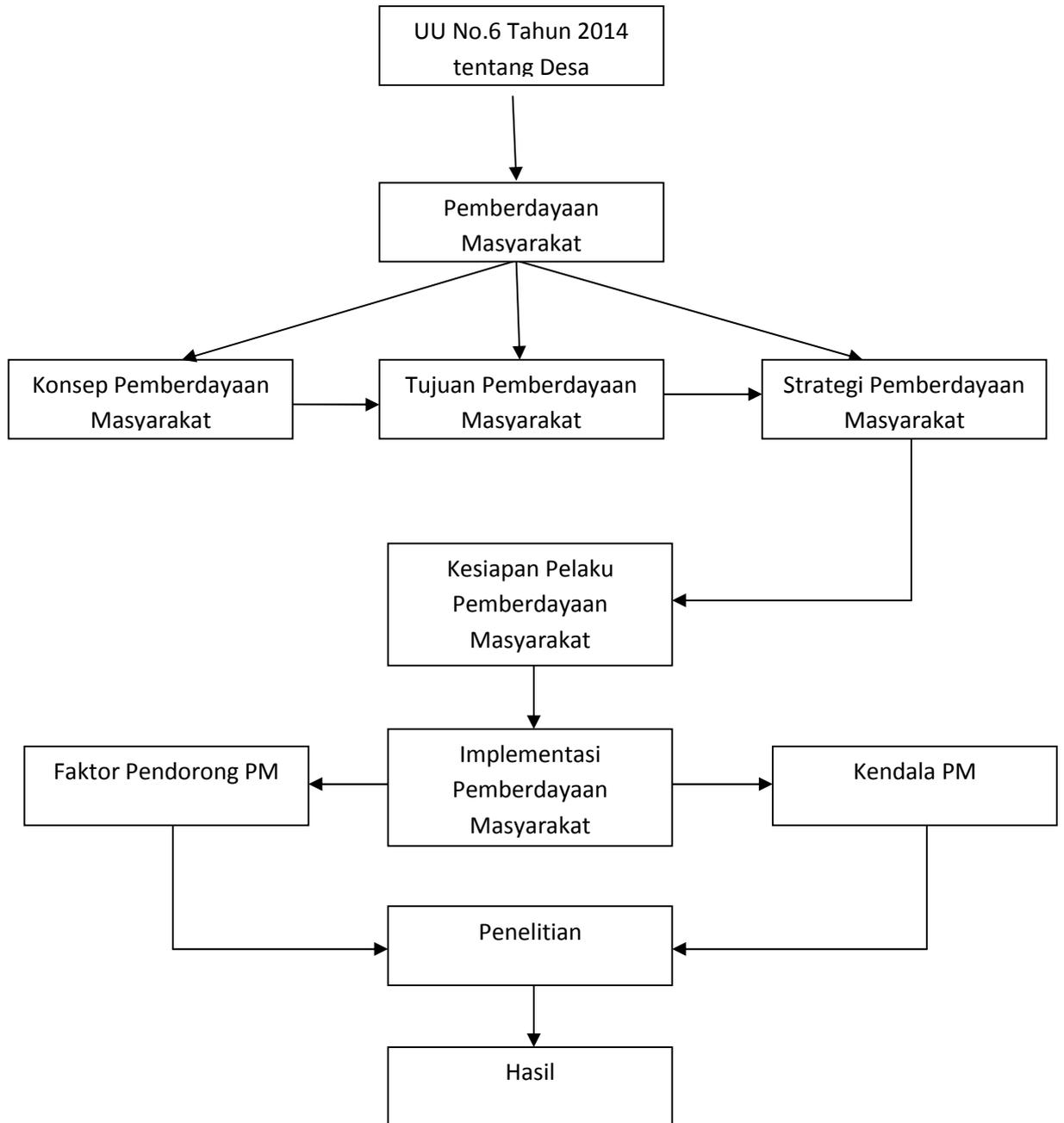
Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan – kekuatan penekan di segala bidang dan sector kehidupan (Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab Negara. *Kedua*, memberi layana publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) Negara.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang

rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Tidak hanya konsep dan tujuan saja yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi strategi lah yang sangat penting, karena strategi yang digunakan akan mempengaruhi kesiapan pelaku pemberdayaan masyarakat untuk mengimplementasikan di berbagai aspek, seperti aspek pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu faktor pendorong dan penghambat implementasi pemberdayaan masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar 1 :

Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran



III.METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian menjadi dasar bagi penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan ilmiah. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pada dasarnya berakar pada latar alamiah atau natural sebagai kesatuan yang utuh, dengan mengendalikan manusia sebagai instrument penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan mengarahkan sasaran penelitian yang menurut Moleong (2007) adalah usaha menemukan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membahas studi dengan fokus rancangan penelitian yang disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan obyekt penelitian).

Menurut Bogdan dan Taylor (Nasution, 1996), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini pun tidak mengutamakan angka-angka statistik, walaupun tidak menolak data kuantitatif.

Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan memahami penyebab terjadinya faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu, diperlukan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat secara utuh dengan memahami totalitas aspek yang terkait didalamnya dan tidak terbatas pada satu atau dua konsep saja. Pada titik ini, amat sulit jika menggunakan pendekatan kuantitatif yang pada batas tertentu hanya ingin mengetahui atau mengukur hubungan antar variabel-variabel. Artinya, kompleksitas persoalan pemberdayaan masyarakat tidak hanya untuk “diketahui” tetapi lebih dari itu harus “dipahami”.

Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi obyek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang sebuah fenomena sosial. Semua itu dilakukan agar dapat menjawab keterkaitan terhadap permasalahan yang tengah dikaji.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangatlah penting untuk membatasi masalah-masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu luas kemana-mana walaupun sifatnya masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Licoln dan Duba (dalam Iskandar 2008) bahwa masalah penelitian kualitatif perlu dibatasi melalui fokus penelitian karena : suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong tetapi berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah, penetapan fokus penelitian dapat membatasi siapa yang ingin diteliti karena fenomena-fenomena yang terjadi bersifat

holistik, fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh di lapangan, fokus penelitian masih bersifat tentatif atau sementara.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

Apakah dengan adanya perubahan model Pemberdayaan Masyarakat seperti yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat menjadikan Desa Hajimena lebih mandiri?

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008) adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moeleong (2007) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini terdapat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun alasan dan pertimbangan-pertimbangan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Desa Hajimena merupakan desa yang mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mulai menjalankan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai pedoman untuk Desa, serta berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Hajimena.

2. Karena lokasi tersebut bisa memudahkan pendekatan sosial kepada masyarakatnya dan perangkat Desa sehingga peneliti lebih mudah untuk melakukan wawancara.
3. Karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti sehingga bisa menghemat biaya dalam penelitian ini.

D. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moeloeng, 2007).

Dalam Iskandar (2008) dengan mengutip pendapat dari Spradley mengemukakan bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sederhana, hanya terdapat situasi sosial tunggal.
2. Mudah memasukinya.
3. Tidak payah dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin, kegiatannya terjadi berulang – ulang.

Adapun dari penjelasan diatas maka informan dalam penelitian ini dipilih dalam beberapa kriteria yang sebagai berikut :

1. Pemerintah, pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini peneliti memilih informan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa Hajimena, dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang penerapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan mendapatkan informasi tentang Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Hajimena.
 2. Sekertaris Desa Hajimena, dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 3. Bendahara Desa Hajimena, dalam Hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang Dana Desa yang turun dan dipergunakan untuk apa saja.
 4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Hajimena dan bagaimana perkembangannya setelah adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana penggunaan dana Desa yang telah diberikan untuk keperluan Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang representatif digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, guna memperoleh gambaran secara objektif terhadap objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Dimana dalam metode ini penulis mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Nurbuko, 2003).

Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki peran yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan didasarkan atau pengalaman langsung, memungkinkan peneliti melihat atau mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data (Moleong, 2007).

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti

untuk memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan Masyarakat dengan mengamati secara umum kegiatan sehari-hari di masyarakat dan kondisi lingkungan.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Nurbuko (2003) metode interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informan dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana didalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka tetapi tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

2. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah

buku, artikel atau surat kabar yang memuat tentang pemberdayaan masyarakat, skripsi yang memuat tentang faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, jurnal melalui internet yang memuat tentang pemberdayaan masyarakat, foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar informan dan rekaman suara melalui handphone saat melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisis data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjukkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data–data tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Hajimena, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah setelah adanya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa akan menjadikan Desa Hajimena menjadi mandiri.
- b. Kesiapan pelaku pemberdayaan masyarakat Desa Hajimena.
- c. Faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat di Desa Hajimena.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-

kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya, dan kecocokan, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya. Pada tahap ini, peneliti menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian. Data yang akan diuji kebenarannya adalah faktor pendukung dan kendala implementasi pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dan Asal-Usul Desa Hajimena

Secara etimologis, Hajimena sebenarnya berasal dari kata Aji, yang berarti ini dan Mena yang berarti duluan (dalam Bahasa Lampung). Kalau diartikan secara harfiah berarti penduduk yang bermukim diwilayah ini pertama kali (terlebih dahulu dari pendatang lain), yaitu Buay Sebiay yang asal mulanya berasal dari daerah Pagaruyung.

Pada abad ke 17, nenek moyang masyarakat Ajimena ini mengadakan migrasi kembali ke daerah Lampung Tengah tepatnya dikampung Gunung Haji, tidak lama kemudian mereka pindah kembali ke daerah Tegineneng yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Pesawaran. Tepatnya yaitu di Kampung Ruluk Helok yang dibuktikan dengan bukti sejarah berupa tempat pemandian para leluhur masyarakat Ajimena yang disebut Way Hilian, yang sampai akhirnya masyarakat Ajimena menempati wilayah sekarang, pada abad ke 18 dikarenakan penyusuran mereka ke hulu sungai menyusuri Way Kandis.

Adapun perubahan nama kampung dari Ajimena menjadi Hajimena tidak diketahui kepastian waktu (diperkirakan abad ke 19) serta alasan perubahan nama tersebut. Ada juga panggilan Buay Sebiay sebagai masyarakat asli Hajimena pada awalnya terdiri dari enam punyimbang (kerabat/saudara) yaitu :

1. Minak Bandar / M. Yusuf (Sesepuh Kampung)
2. Batin Dulu

3. Minak Raja Niti
4. Sultan Ratu / Hi. Abdur Rahman
5. Pesiwa Batin / Abdul Karim
6. Raja Usuh

*(Sumber dari Dokumen Desa Hajimena tentang Sekelumit Asal-Usul Desa Hajimena)

Sejak tahun 1862, Kampung Ajimena telah memiliki Kepala Kampung yaitu Hambung Purba sebagai Kepala Kampung pertama. Hal ini dibuktikan dengan sebuah peninggalan sejarah berupa stempel kuningan yang bertuliskan **Kampung Ajimena tahun 1862** dengan tulisan Aksara Lampung, dan semenjak tahun 1979 Kepala Kampung berubah menjadi Kepala Desa.

Daftar nama-nama pejabat kepala kampung / kepala Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 1862 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar nama-nama pejabat Kepala Desa Hajimena

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Periode / Tahun
1	Ambrung Purba	Kepala Kampung	1862-1880
2	Tihang Ratu (Poyah Th. Ratu)	Kepala Kampung	1901-1970
3	Hi. Matnuh	Kepala Kampung	1908-1925
4	Hi. Rahman Malaratu	Kepala Kampung	1926-1930
5	Pr. Bandar	Kepala Kampung	1930-1937
6	Raja Niti	Kepala Kampung	1938-1941
7	Minjak Pengaturan	Kepala Kampung	1941-1944
8	Raja Usuh	Kepala Kampung	1944-1947
9	Hi. Tihang Ratu	Kepala Kampung	1948-1957
11	Sultan Turunan	Kepala Kampung	1958-1966
11	Hi. Abrur Rahman	Kepala Kampung	1966-1968
12	Mukhsin	Kepala Kampung	1968-1979
13	P. Simanjuntak	Kepala Desa	1979-1988

14	Anwar Anoem Sebiay	Kepala Desa	1988-1995
15	Hi. Natalia Anoem S	Kepala Desa	1995-1999
16	Rais Yusuf	Kepala Desa	1999-2008
17	Bahtiar Indris	Kepala Desa	2008-2012
18	Rais Yusuf	Kepala Desa	2012 sampai sekarang

*Sumber : Monografi Desa Hajimena

B. Keterangan Demografi Desa Hajimena

1. Letak Geografis

Letak geografi Desa Hajimena, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Pemanggilan

Sebelah Selatan : Kelurahan Rajabasa – Bandar Lampung

Sebelah Barat : Desa Kurungan Nyawa – Pesawaran

Sebelah Timur : Desa Sidosari

Luas wilayah Desa Hajimena adalah 750 Ha, letak geografis Desa Hajimena ada pada dataran rendah sedangkan kondisi topografi adalah datar dan ketinggian desa dari permukaan laut adalah 85 Meter. Klasifikasi Desa Hajimena merupakan Desa Swakarya. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah jasa. Di Desa Hajimena terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) dan terdapat Lembaga Pemasarakatan Desa (LPM). Desa Hajimena terdiri dari Rukun Warga sebanyak 14 RW dan Rukun Tetangga sebanyak 53 RT dan jumlah Dusun Di dalam Desa Hajimena sebanyak 7 Dusun, yang terdiri dari:

1. Dusun I Induk Kampung

2. Dusun II Way Layap

3. Dusun III Sinar Jati
4. Dusun IV Bataranila
5. Dusun V Perum Polri
6. Dusun VI Puri Sejahtera
7. Dusun VII Sidorejo

Jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan yang membawahi : 6 KM

Jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten / kota yang membawahi : 60 KM

Jarak dari kantor desa ke kantor provinsi yang membawahi : 13 KM

Jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten / kota lain yang terdekat : 8 KM

2. Di Bidang Pendidikan

Tabel 2. Jumlah sekolah atau sarana pendidikan yang berada di Desa Hajimena :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	
		Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	-	5
2	Sekolah Dasar (SD) atau sederajat	2	-
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	1	-
4	Akademik / Perguruan Tinggi atau yang sederajat	2	-

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Bedasarkan tabel diatas di Desa Hajimena terdapat 5 taman kanak-kanak swasta yaitu TK-Alazar, TK ar-rasyid, TK amanah, TK Harapan Jaya, TK-Aisyiyah. Terdapat 2 SD Negeri yaitu SDN 1 Hajimena dan SDN 2 Hajimena kemudia terdapat 1 SMP yaitu SMP N 3 Natar

dan terdapat 6 akademi/ perguruan tinggi yang sederajat yaitu Politeknik Negeri Lampung dan Poltekes .

3. Di Bidang Hukum

Di bidang hukum di Desa Hajimena masih terdapat kendala yang sering dihadapi seperti masih dijumpai pelanggaran peraturan yang ada, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas baik itu pelanggaran karena rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara, kelengkapan pengguna sepeda motor roda dua dan kelengkapan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor roda dua. Di Desa Hajimena juga masih banyak dijumpai anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor, mereka juga tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap, padahal anak di bawah umur menggunakan kendaraan apalagi tidak melengkapi dirinya dengan pelindung kepala (helm) dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah melanggar peraturan. Kemudian hambatan lainnya terdapat pada penegakan hukum yang masih kurang khususnya Polisi Lalu Lintas di Hajimena dikarenakan bahwa Polisi Lalu Lintas tidak melaksanakan kinerja Polisi Lalu Lintas yang terangkum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Polisi Lalu Lintas.

Kendala yang selanjutnya adalah alergi terhadap aparat penegak hukum, masyarakat Desa Hajimena yang enggan terhadap Polisi Lalu Lintas karena menimbulkan banyak kasus penyuapan yang terjadi menimbulkan banyak tanggapan buruk terhadap kinerja dari Polisi Lalu Lintas itu sendiri, namun kondisi ini bisa di atasi dengan Polisi Lalu Lintas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yang sesuai dengan kinerja yang seharusnya dilaksanakan dan untuk para pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

4. Keamanan

Tabel 3. Sarana Keamanan Lingkungan

No.	Sarana Keamanan Lingkungan	Jumlah
1	Pos hansip / Siskamling	7
2	Pos Polisi	2

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Pada table 3, menunjukkan bahwa terdapat sarana keamanan lingkungan yang berupa Pos Hansip / siskamling yang berjumlah 7 Pos Hansip yang terdapat di masing-masing dusun di Desa Hajimena. Sedangkan untuk Pos Polisi terdapat 2 Pos yang berada di daerah bunderan Desa hajimena, adanya sarana keamanan lingkungan ini guna menciptakan keamanan dan ketertiban di Desa Hajimen.

C. Komposisi Penduduk Desa Hajimena

Jumlah penduduk Desa Hajimena sampai tahun 2013 adalah 14.884 Jiwa, terdiri dari:

1. Jumlah Laki – laki : 7.507 Jiwa
2. Jumlah Perempuan : 7.377 Jiwa
3. Jumlah Kepala Keluarga : 3.814 kepala keluarga.

***(Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010)**

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Komposisi Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Bila di tinjau dari umur dan jenis kelamin penduduk yang mendiami Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4: Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

No.	Umur / Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	989	711	1700
2	5-9	880	702	1582
3	10-14	921	793	1714
4	15-19	1205	1351	2556
5	20-24	1305	1455	2760
6	25-50	1200	1300	2500
7	50 ke atas	1007	1065	2072
Jumlah		7507	7377	14884

*Sumber : monografi Desa Hajimena 2015

Pada tabel 4, menunjukkan bahwa di Desa Hajimena penduduk yang tergolong usia produktif berjumlah 7.816 orang yang terdiri dari 3.710 orang laki-laki, dan 4.106 orang perempuan. Sedangkan penduduk yang berusia Non-produktif berjumlah 7.068 orang, yang terdiri dari 3.797 orang laki-laki dan 3.271 orang Perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk yang berusia Produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk Non-produktif. Berbeda dengan kelompok umur usia produktif, jumlah perempuan lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah laki-laki, sedangkan pada kelompok umur usia Non-produktif jumlah laki-laki lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Suku / Ras

Bila di tinjau dari suku / ras penduduk yang mendiami Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 : Komposisi Penduduk Menurut Suku / Ras.

No.	Suku / Ras	Jumlah
1	Suku Batak	550 KK
2	Suku Jawa	1200 KK
3	Suku Lampung	1000 KK
4	Suku Padang	25 KK
5	Suku Sunda	1010 KK
6	Suku Tionghoa	15 KK
7	Suku Bali	14 KK
Jumlah		3. 814 KK

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang berdomisili di Desa Hajimena adalah suku Jawa yaitu 1200 Kepala Keluarga, sedangkan suku pribumi yaitu Lampung berjumlah 1000 Kepala Keluarga, dan suku Sunda 1010 Kepala Keluarga. sedangkan Suku yang lainnya seperti Batak sebanyak 550 Kepala Keluarga, Suku Tionghoa 15 Kepala Keluarga, dan Bali 14 Kepala Keluarga.

3. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Bila di lihat dari segi agama, agama yang di anut oleh penduduk Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Komposisi Penduduk Menurut Agama.

No.	Agama	Jumlah	presentase
1	Islam	13.884	93,3
2	Katolik	200	1,34
3	Protestan	750	5,04
4	Hindu	35	0,23
5	Budha	15	0,10
Jumlah		14.882	100,00

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Tabel 6, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Hajimena menganut agama Islam yaitu sejumlah 13.884 orang (93.3 %), yang menganut agama katolik sejumlah 200 orang (1.34 %) dan penduduk Desa Hajimena ada yang menganut agama Protestan sebanyak 750 orang (5.04 %), Hindu sebanyak 35 orang (0.23 %), dan yang menganut agama Budha yaitu sebanyak 15 orang (0.10 %).

4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Bila di tinjau dari segi mata pencahariannya, maka dapat di lihat mata pencaharian penduduk Desa Hajimena pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 : komposisi penduduk menurut mata pencahariannya.

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	153
2	PNS	142
3	POLRI	25
4	TNI	15
5	Pedagang	77
6	Buruh Tani	103
7	Buruh Perusahaan	91

8	Buruh Bangunan	88
9	Supir	13
10	Tukang Ojek	50
11	Pensiunan	130
12	Peternak	12
13	Dokter	4
14	Bidan	6
15	Wiraswasta	938
Jumlah		

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Tabel 7, menunjukkan bahwa di Desa Hajimena jumlah penduduk yang bermata pencaharian Wiraswasta adalah paling besar sebanyak 938 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian lainnya. Dengan demikian mata pencaharian penduduk di Desa Hajimena mayoritas berwiraswasta.

5. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Bila di lihat dari segi pendidikan penduduk Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 : Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD / Sederajat	1170
2	Masih SD / sederajat	1992
3	Tamat SMP / sederajat	1205
4	Masih SMP / sederajat	1549
5	Tamat SMA / sederajat	2380
6	Masih SMA / sederajat	2089
7	Tamat PT / Akademis	1009
8	Masih PT / Akademik	1123
9	Buta Huruf	576

10	Belum Sekolah	992
11	Paud/ TK	808
Jumlah		14.884

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Tabel 8, menunjukkan bahwa penduduk Desa Hajimena tamat sekolah dasar/ sederajat sebanyak 1170 orang dan 1992 orang masih Sekolah Dasar. Selanjutnya, penduduk Desa Hajimena yang menempuh pendidikan SLTP sebanyak 1205 orang dan masih duduk dibangku SLTP yaitu sebanyak 1549 orang. Mayoritas penduduk Desa Hajimena adalah berpendidikan menengah keatas yaitu sebanyak 2380 tamatan SLTA dan 2089 masih duduk dibangku SLTA. Kemudian Untuk lulusan perguruan tinggi sebanyak 1009 orang dan 1123 orang masih duduk di perguruan tinggi. Sedangkan yang menunjukkan buta huruf sebanyak 567 orang, belum sekolah menunjukkan sebanyak 992 orang dan yang masih PAUD atau TK sebanyak 808 orang. Keadaan ini menunjukkan mayoritas penduduk Desa Hajimena adalah lulusan SLTA.

D. Penggunaan Dan Penguasaan Lahan Desa Hajimena

Bila di tinjau dari segi penggunaan dan penguasaan lahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 : Luas wilayah Menurut Jenis Penggunaannya.

No.	Jenis Penggunaannya	Jumlah (Ha)
1	Tanah Perumahan dan Pemukiman	300
2	Tanah Perkebunan	100
3	Tanah Ladang, Huma, Tegalan, Kebun, Kolam, Tambak, Tabak, Empang, Pengembalaan, Padang Rumpung	220
4	Tanah Perkantoran, Pertokoan	60
5	Tanah Persawahan	40
6	Bangunan Industri	30
Jumlah		750

*Sumber : Monografi Desa Hajimena 2015

Berdasarkan tabel 9, terlihat bahwa sebagian besar tanah di pergunakan untuk perumahan dan pemukiman yaitu seluas 300 Ha. Kemudian tanah yang dipergunakan untuk perkebunan yaitu seluas 100 Ha. Tanah Ladang, Huma, Tegalan, Kebun, kolam, tambak, tabat, empang, penggembalaan, padang rumput seluas 220 Ha. Tanah perkantoran dan pertokoan seluas 60 Ha. Untuk tanah persawahan seluas 40 Ha. Kemudian untuk bangunan industri seluas 30 Ha. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan dan penguasaan lahan di Desa Hajimena sebagian besar untuk perumahan dan pemukiman.

E. Sarana Transportasi Desa Hajimena

Di Desa Hajimena sebagian besar lalu lintas antar desa yaitu melalui darat dan jenis permukaan jalan yang terluas adalah aspal/beton. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk di Desa Hajimena yaitu jenis angkutan yang terdapat seperti becak yang berada di sekitar bunderan Hajimena . Kemudian terdapat ojek sepeda motor di setiap jalan kecil dan di sekitar bunderan Hajimena dan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dan roda dua.

F. Visi Desa Hajimena

“Santun dan Iklas dalam Pelayanan Masyarakat dang dengan Semangat Gotong Royong Membangun Desa yang Kondusif dan Sejahtera di Landasi dengan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

G. Misi Desa Hajimena

Misi Desa Hajimena :

- Melaksanakan kinerja dengan penuh amanah dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang bersih dan mandiri.
- Menciptakan sikap santun dan ikhlas pada masyarakat dalam memberikan pelayanan.
- Menciptakan kerukunan kerja antar perangkat desa dalam melaksanakan tugas dengan disertai tanggung jawab.
- Membangun ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang efisien dan efektif.
- Merencanakan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerataan pembangunan.

H. Struktur Organisasi Desa Hajimena

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Kepala Desa	: Rais Yusuf
Sekretaris Desa	: Abdul Roni
Kepala Urusan Pemerintahan	: Endang Iskandar
Kepala Urusan Pembangunan	: Abdul Roni
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	: M.Munazar
Kepala Urusan Umum	: Indah Ratna Marita
Kepala Urusan Keuangan	: Saripah
Kepala Dusun I Induk Kampung	: Drs. M. Syahnuri
Kepala Dusun II Way Layap	: Hi. Hazairin, S.KM
Kepala Dusun III Sinar Jati	: Drs. Mansahid

Kepala Dusun IV Perum Bataranila : Saiful Ibrahim
Kepala Dusun V Perum Polri : Trisna
Kepala Dusun VI Puri Sejahtera : Abdul Halim, S.KM
Kepala Dusun VII Sidorejo : Budi Prasetyo

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada amanat yang harus dijalankan oleh Desa, Yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setiap desa harus memiliki BUMDes, tujuannya untuk menambah pendapatan desa dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sejak tahun 2015 desa Hajimena memiliki BUMDes, BUMDes tersebut berbentuk jasa, seperti jasa pembayaran Pajak Motor atau Mobil. Di desa Hajimena BUMDes juga di jadikan sebagai Konsep Desa Mandiri.

Dalam model pemberdayaan masyarakat, di desa Hajimena masih menggunakan modep top-down, namun mulai tahun ini akan di terapkan model battom-up atau partisipatif. Perubahan model tersebut dilakukan dengan tujuan agar Lembaga Pemberdayaannya Masyarakatnya aktif, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang aktif dan berkualitas,serta mampu menjadikan desa lebih maandiri.

Dalam pemberdayaan masyarakat adapaun kesiapan pelaku pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Namun di desa Hajimena kesiapan pelaku nya sangat

kurang. Masyarakatnya masih enggan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Begitu juga untuk para ketua Rukun Tetangga (RT) mereka juga enggan untuk berpartisipasi dalam hal pemberdayaan masyarakat karena mereka merasa pemberdayaan itu adalah tanggung jawab kepala desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). hal itu juga menjadi factor kendala dalam implementasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Hajimena.

Adapun faktor pendukung implementasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Hajimena, yaitu :

- Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki desa Hajimena berupa kantor balai desa, laptop atau computer, meja, dan kursi plastic. pendanaan di desa hajimena diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD), dana Desa sebesar Rp. 305.680.140, bantuan dari APBD kabupaten T.A 2015 sebesar Rp. 3.000.000, bantuan operasional dari Provinsi Lampung T.A 2015 sebesar Rp. 5.600.00, bantuan APBD kabupaten untuk pilkada T.A 2015 sebesar RP.10.000.000, dari DPPUD / TAPD T.A 2015 sebesar Rp. 45.000.000 dan dari pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Pendanaan

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Hajimena pelaksanaannya sudah baik baik dan mencapai target pembangunan, namun untuk implementasi pemberdayaan masyarakat nya masih sangat kurang atau dapat dikatakan belum berhasil.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melihat hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang berkaitan dengan implementasi pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Peran kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi terutama peran kepala desa dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, serta kesadaran masyarakat desa Hajimena, agar masyarakat desa Hajimena yang belum berdaya bisa lebih berdaya lagi dan mampu menjadi masyarakat serta desa yang lebih mandiri.
2. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa Hajimena, kepala desa beserta ketua LPM dan ketua BPD harus memperhatikan masalah-masalah sosial yang ada di desa Hajimena, agar tidak ada kesenjangan sosial antar dusun atau antar warga.
3. Untuk pembangunan desa, sebaiknya rencana pembangunan di perhatikan lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta harus melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung hasil pembangunan dan merasa memiliki hasil pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- A.M.W . Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. “*Pemberdayaan (Empowerment)*” dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (eds) 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Ali, Madekhn. 2004. *Orang Desa Anak Tiri Pembangunan*. Yogyakarta: Averroes Press.
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Nusantara.
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, desember 2002*.
- Hulme, David & M. Turner. 1990. *Sociology of Development : Theories, Policies and Practices*. Hertfordhire : Harvester Whearsheaf.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development Creating Community Alternatives Vision, Analysis, and Practice*. Australian : Longman.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Katasasmita, G. 1996. *Power dan Empowerment : Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Miles, Matthew dan Huberman, A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexyi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosada Karya.

- Moeljono, Vidhyandika. 1996. *“Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT” dalam S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi.* Jakarta: CSIS.
- Nurbuko, Cholid. dkk. 2003. *Metodologi Penelitian.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Person, R.J. 1994. *Empowerment oriented Social Work Practice With the Eldelry.*
- Pranarka dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment).* Jakarta: CSIS.
- Prijono, O.S dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi.* Jakarta: CSIS.
- Slamet. M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk pola Perilaku Manusia Pembangunan. /*Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat sudrajad.* Bogor: IPB Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,2014.

Arsip Desa:

Demografi Desa Hajimena kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2015 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Laporan Pemerintah Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

Sumber Internet :

<http://kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html>. (diakses pada tanggal 25 agustus 2015)

<http://sipuu.setkab.go.id/PUU/173985/uu062014.pdf> (diakses pada tanggal 25 agustus 2015)

<http://www.Pemuda.my.id.2014/08/pemberdayaan-masyarakat.html> (diakses pada tanggal 25 agustus 2015)

<http://www.yipd.or.id/en/articels/tentang-undang-undang-desa.html> (diakses pada tanggal 25 agustus 2015)